

**PENILAIAN KINERJA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT**

Disusun oleh :

NAMA : KALIS ENDAH WAHYUNI
NPM : 2143021125
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P)



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

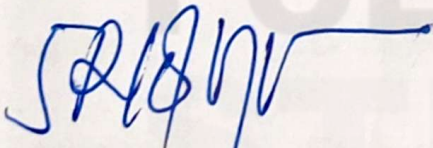
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : KALIS ENDAH WAHYUNI
NPM : 2143021125
Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK
Program Studi : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : PENILAIAN KINERJA ANGGARAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : SERVICE BUDGET PERFORMANCE
ASESSMENT BEKASI DISTRICT
EDUCATION WEST JAVA
PROVINCE

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

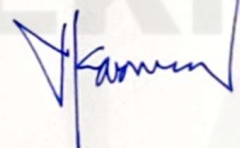
Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si)

Pembimbing II



(Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : KALIS ENDAH WAHYUNI
NPM : 2143021125
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
JUDUL TESIS : PENILAIAN KINERJA ANGGARAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister
Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,

Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 11 Nopember 2024

Pukul : 09.30 s.d 11.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Dr. Firman Hadi Rivai, MPA

Sekretaris : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

Anggota : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd.

Pembimbing 1 : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si

Pembimbing 2 : Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Kalis Endah Wahyuni**
NPM : **2143021125**
Jurusan : **Administrasi Publik**
Program Studi : **Administrasi Pembangunan Negara**
Konsentrasi : **Manajemen Keuangan Negara**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul **“Penilaian Kinerja Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat”** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 11 November 2024



Kalis Endah Wahyuni

NPM 2143021125

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: “Penilaian Kinerja Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.) pada Program Pascasarjana (S2) Magister Administrasi Publik Politeknik STIA LAN Jakarta. Peneliti menyadari sepenuhnya penyusunan tesis ini dapat terselesaikan atas dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dari awal sampai akhir penelitian teruntuk:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Bapak Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA. dan Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti selama penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Asropi, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Magister Terapan.
4. Bapak Dr. Hamka, MA selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Bagian Akademik para pendamping Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Magister Terapan.
6. Bapak Dr. Carwinda, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat yang menjabat Tahun 2023 pada saat Peneliti meneliti, yang berkenan untuk memberikan ijin untuk pengumpulan data terkait penelitian ini.
7. Rekan – rekan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang berkenan diwawancarai dalam pengumpulan data.
8. Kepada keluargaku tercinta yang memberikan dukungan dan do’a selalu.
9. Seluruh rekan – rekan MKN angkatan 2021 yang selalu memberikan dukungan.

10. Semua pihak yang mendukung penyelesaian tesis ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan yang membacanya. Semoga Allah SWT selalu membimbing dan melindungi kita semua, Amin.

Jakarta, 11 November 2024

KALIS ENDAH WAHYUNI



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRAK

Penelitian Kinerja Anggaran Dina Pendiidkan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat

¹Kalis Endah Wahyuni, ²R. Luki Karunia, ³Neneng Sri Rahayu
kalis.ananthakuanantha@gmail.com/ 2143021125@stialan.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian kinerja anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi periode Tahun Anggaran 2020-2023. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menghasilkan penilaian kinerja anggaran. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja anggaran Dinas Pendidikan Kab. Bekasi, ditinjau dari sisi ekonomis tahun 2020-2023 mengalami fluktuatif setiap tahunnya dan dikategorikan ekonomis karena tingkat rasio ekonomisnya diantara 90%-100%. Untuk tingkat efisiensi pada pendapatan anggaran belanja tahun 2020-2023, dikategorikan kurang efisien karena rasio efisiensinya lebih dari 90%. Lalu pada tingkat efektivitasnya mengalami penurunan efektifitasnya dari tahun 2020-2023, tetapi masih dikategorikan efektif karena tingkat rasio efektifitasnya diantara 90% - 100%. Oleh sebab itu Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi perlu lebih memprioritaskan penyusunan perencanaan anggaran yang lebih efisien berdasarkan konsep *Value for money* yaitu efektivitas anggaran, efisiensi anggaran, ekonomis, dan anggaran.

Kata Kunci: **Kinerja Anggaran, Value for Money, LRA Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi**

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRACT

Service Budget Performance Analysis Bekasi District Education West Java Province

¹Kalis Endah Wahyuni, ²R. Luki Karunia, ³Neneng Sri Rahayu
kalis.ananthakuanantha@gmail.com/ 2143021125@stialan.ac.id

This research aims to assess budget performance at the Bekasi District Education Office for the 2020-2023 Fiscal Year period. The method used is descriptive qualitative to produce a budget performance assessment. Data collection was carried out through interviews and document review. The results of this research show the budget performance of the District Education Office. Bekasi, viewed from an economic perspective in 2020-2023, experiences fluctuations every year and is categorized as economical because the economic ratio level is between 90%-100%. For the level of efficiency in the 2020-2023 budget revenue, it is categorized as less efficient because the efficiency ratio is more than 90%. Then the level of effectiveness experienced a decrease in effectiveness from 2020-2023 but was still categorized as effective because the level of effectiveness ratio was between 90% - 100%. Therefore, the Bekasi District Education Office needs to prioritize the preparation of more efficient budget planning based on the Value for money concept. namely budget effectiveness, budget efficiency, economics, and budget.

Keywords: Budget Performance, *Value for Money*, LRA Bekasi District Education Office

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Permasalahan.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis.....	14
1. Tinjauan Kebijakan.....	14

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.....	14
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.	14
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.....	15
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.....	15
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	16
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 mengenai Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.....	18
2. Tinjauan Teoritis.....	18
a. Administrasi Publik.....	18
b. Manajemen Keuangan Negara	21
c. Pengertian Kinerja Anggaran	22
d. Pengukuran Kinerja Anggaran	26
e. Penilaian Kinerja Anggaran	41
f. Pengelolaan Kinerja Anggaran	42
g. Definisi Operasional Konsep.....	43
C. Kerangka Berpikir.....	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	55
A. Metodologi Penelitian.....	55
B. Teknik Pengumpulan Data.....	56
1. Wawancara (Interview).....	56

2. Telaah Dokumen.....	57
3. Observasi.....	58
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	59
D. Instrumen Penelitian.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	61
A.Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....	61
B. Hasil Penelitian.....	75
1. Ekonomis	75
2. Efisiensi	87
3. Efektivitas.....	92
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	111
A. SIMPULAN.....	111
B. SARAN.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN	

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi	5
Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3.1 Key Informant Penelitian	56
Tabel 4.1 Penilaian Kinerja Ekonomis Terkait Realisasi Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2020 – 2023	76
Tabel 4.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022	89
Tabel 4.3 Penilaian Kinerja Efisiensi dengan Realisasi Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2023	90
Tabel 4.4 Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2022	94
Tabel 4.5 Penilaian Kinerja Efektivitas dengan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2023	96
Tabel 4.7 Analisis Keserasian Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2023	99
Tabel 4.8 Analisis Efisiensi Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2023	101
Tabel 4.9 Tingkat Serapan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2023	103
Tabel 4.10 Laporan Anggaran Realisasi Penerimaan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2023	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep Value For Money	43
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	54
Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi	68
Gambar 4.1 Alur Pikir Pengukuran Kinerja	104
Gambar 4.2 Rapat PPTK dan Dinas ULP	108



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Sebagai perwujudan sistem pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, adil, dan efektif (*good governance*), sistem akuntabilitas kinerja yang memadai menjadi salah satu hal yang mendukung kinerja pemerintah daerah. Setiap pengembalian amanah (*entity*) secara akuntabel kepada pemberi amanah (*principal*). Kinerja pengembalian amanah, sebagai ukuran prestasi ketercapaian tujuan entitas, harus bisa dimonitor, dinilai dan dievaluasi dalam sistem hirarki organisasi formal yang sudah ditetapkan. Hal ini terutama untuk mewujudkan akuntabilitas vertikal.

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah menyelenggarakan pemerintahan dengan cara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Reformasi birokrasi yang efektif dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 5 (Perpres) pada tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi. Pada pasal tiga (3), yang tercantum pada Peraturan Presiden yang dimaksud, Presiden memberikan instruksi untuk membuat penetapan indikator dan target kinerja di seluruh kementerian yang menjelaskan keberhasilan pencapaian kinerja baik berupa hasil (*output*) maupun manfaat (*outcome*). Lalu melanjutkan Reformasi birokrasi Pemerintah tersebut, Dimulai dengan reformasi dalam sektor keuangan negara yang ditandai dengan terbitnya tiga (3) kebijakan Undang-Undang Keuangan Negara yang terdiri dari; Undang-Undang (Perpu) Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Pengelolaan Keuangan Negara, Perpu Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Bendahara Umum Negara, serta Perpu Nomor 15 Tahun 2004 yang mengatur Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Keuangan Negara.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia kemudian ditegaskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 81 tahun 2010 yang mengatur *Grand Design*

Reformasi Birokrasi tahun 2010–2025. Peraturan Presiden (Perpres) tersebut kemudian menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi memiliki tujuan untuk terciptanya tata kelola keuangan negara yang profesional, akuntabilitas, dan terarah, yang dikenal dengan istilah *good governance*. Upaya ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik melalui perubahan pelayanan yang lebih baik. Dalam hal untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melaksanakan agenda tata kelola dan penajaman fungsi organisasi, serta menyempurnakan proses bisnis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang adil. Kegiatan ini mencakup pelaksanaan belanja negara yang efektif, dengan fokus pada prioritas pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di sektor pendidikan dan kesehatan, serta pengurangan kesenjangan di berbagai bidang. Untuk mendukung pencapaian tersebut, pemerintah mengembangkan berbagai program inovasi yang dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah. Sebagai entitas yang bertugas melayani masyarakat, pemerintah memerlukan anggaran yang berfungsi sebagai roda penggerak dalam menjalankan pemerintahan. Anggaran bukan hanya sekadar alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian yang efektif dalam organisasi. Dalam konteks ini, anggaran menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal yang vital, berfungsi untuk membina pembangunan sosial- Ekonomi, memastikan keberlanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara umum, anggaran berperan sebagai alat manajemen untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditentukan. Selama kurang lebih 18 tahun, Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah telah dilaksanakan dengan mengimplementasikan tiga pendekatan utama: Anggaran Terpadu (Unified Budgeting), Anggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting), dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, mengacu pada pendekatan-pendekatan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang terintegrasi, berfokus pada hasil kinerja, serta memperhitungkan pengeluaran dalam jangka menengah. Melalui upaya ini, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan *good governance* dan *clean governance*

yang lebih baik. Tujuannya adalah agar terciptanya *good governance and clean governance* di Indonesia.

Dalam setiap organisasi atau instansi, anggaran memiliki peranan yang sangat krusial. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menstabilkan kondisi keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendistribusikan alokasi sumber daya umum, merencanakan, mengendalikan aktivitas organisasi, serta mengevaluasi kinerja. Proses penilaian kinerja ini bersifat sistematis, bertujuan untuk menentukan sejauh mana sebuah program atau kegiatan yang telah dirancang sesuai dengan rencana awal, dengan fokus utama pada apakah tujuan yang ditetapkan selama perencanaan menyentuh ketercapaian. Melalui pengukuran kinerja yang berkelanjutan, organisasi dapat memperoleh umpan balik yang berharga. Umpan balik ini menjadi landasan untuk melakukan perbaikan yang terus-menerus, sehingga keberhasilan di masa depan dapat diraih dengan lebih optimal. Dengan demikian, pengukuran kinerja menjadi bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk memantau dan meningkatkan kinerja, sekaligus memastikan fokus pada tujuan organisasi untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Kinerja anggaran, merupakan sebuah perosalan untuk dianalisis secara mendalam agar dapat dinilai sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan pelaksanaan keuangan yang berlaku. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan dengan dasar standar dan ketentuan yang diatur oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dimana SAP tersebut ada karena Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang menjadi acuan penting bagi semua unsur yang ada pada pelaporan yang menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas kepada banyak pihak, terutama kepada pihak eksternal dari eksekutif. Dengan pendekatan ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dapat terjaga dengan baik.

Semakin berkembangnya zaman, begitu juga semakin pesat perkembangan organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Hal ini,berimbas adanya suatu fenomena yang menguatkan tuntutan akuntabilitas publik dan

transparansi dan informasi pemerintah. Dimana, organisasi pemerintahan itu sendiri tidak luput akan penilaian yang dianggap tidak tepat mempergunakan sumber dana dan membuat institusi merugi. Karena alasan itulah terciptanya tuntutan baru yaitu organisasi pemerintahan harus memperhatikan *value for money* dalam menerapkan sumber dana dan mengimplementasikan kegiatannya. *Value for Money* merupakan ekspresi pelaksanaan lembaga sektor publik yang mendasarkan ada tiga elemen dasar, yaitu: ekonomis, efisien dan efektivitas. publik (Mardiasmo,2004:230).

Efektivitas perencanaan dan penganggaran senantiasa menjadi masalah klasik yang terus terjadi, sehingga mengakibatkan kinerja anggaran pada lembaga Pemerintah Daerah khususnya suatu SKPD menjadi lemah. Tidak terkecuali yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi provinsi Jawa Barat yang terdapat beberapa permasalahan pada kinerja keuangan mengenai realisasi penyelenggaraan kegiatan yang ditargetkan dapat meningkatkan pengelolaan terkait kapasitas anggaran. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi ada beberapa SKPD. Sebagai suatu tanggung jawab dari daerah untuk peningkatan masyarakat yang lebih sejahtera dan dapat dipantau dengan cara melihat kemampuan suatu daerah untuk melakukan pembiayaan terkait segala kegiatan daerahnya bisa dilihat dari segi kinerja keuangan daerah yang memiliki tujuan untuk bisa memaksimalkan nilai kinerja dari pemerintah daerah. Ektivitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bisa dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LR-APBD) beberapa SKPD pada Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi terlihat masih kurang mampu dalam menggali potensi yang dimiliki dinasny dan terdapat kelalaian pada tahap perencanaan terkait pengelolaan keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Dari beberapa SKPD peneliti memilih Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sebagai lokus penelitian ini dikarenakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi adalah salah satu SKPD yang rendah nilai penyerapannya. Berikut iini disajikan

anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2020 sampai dengan tahun 2023:

Tabel 1.1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Tahun	Anggaran pendapatan (Rp)	Anggaran belanja (Rp)
2020	1.629.412.694.612,00	1.629.412.694.612,00
2021	1.700.410.243.238,00	1.700.410.243.238,00
2022	1.716.552.613.612,00	1.716.552.613.612,00
2023	1.726.041.678.680,00	1.726.041.678.680,00

Sumber: LR- APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, 2023.

Berdasarkan tabel-1.1 Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendidikan Kab. Bekasi pada tahun 2020 sampai tahun 2023 tidak sama cenderung mengalami kenaikan. Namun, realisasi belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi pada tahun 2020. Hal ini masih belum dapat menjelaskan apakah penerapan anggaran dan perimbangan apakah menunjukkan hasil yang baik atau sebaliknya pada Dinas Pendidikan Kab. Bekasi yang dapat kita lihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2

Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kab. Bekasi

Tahun	Realisasi pendapatan (Rp)	Realiasi belanja (Rp)
2020	1.629.412.694.612,00	1.523.610.298.798,00
2021	1.700.410.243.238,00	1.579.750.999.966,00
2022	1.716.552.613.612,00	1.572.480.505.892,00
2023	1.726.041.678.680,00	1.585.543.942.629,00

Sumber: LR- APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, 2023

Dari Tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,04% tetapi tahun 2021 sampai tahun 2022 Mengalami penurunan sebesar 0,10%

dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2023 sebesar 1%. Realisasi belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi pada tahun 2021 meningkat dan kembali menurun ditahun 2022 dan meningkat kembali pada tahun 2023. Hal ini belum dapat menjelaskan apakah realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi menunjukkan hasil yang baik atau malah sebaliknya.

Pelayanan Publik, berdasarkan pertumbuhan APBD, maupun Dana yang dialokasikan untuk transfer yang berada pada kondisi yang mempengaruhi kepada tingkat penerimaan dan realisasi pendapatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi masih belum terbaca dengan baik. Begitupun dengan partisipasi alokasi dana di Dinas Pendidikan yang bersumber dari pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

Dimensi reformasi lembaga sektor publik, seperti pemerintahan daerah, dan lembaga di bawahnya dalam rangka pemberian pelayanan publik (*public service*) secara ekonomis, efisien, dan efektif adalah dengan memberikan otonomi dan desentralisasi tanggung jawab dalam memberikan pelayanan masyarakat kepada pemerintah daerah. Agar pengelolaan dana masyarakat yang sangat besar tersebut dikelola dan dilaksanakan secara transparan dengan memperhatikan tingkat ekonomis,efisiensi, efektivitas, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti mengidentifikasi masalah dalam kinerja penganggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Kinerja anggaran yang masih belum baik dengan melihat dari serapan anggaran yang cenderung menurun dari tahun ke tahun;
2. Penggunaan anggaran belum efisien.
3. Masih selalu terdapat SILPA dalam setiap aktifitas

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka diambil rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

Bagaimana penilaian kinerja anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Pada Tahun Anggaran 2020-2023 ?

D. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini dapat terlaksana dengan tepat dan tepat sasaran, maka penelitian ini mempunyai tujuan. Dan berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disebutkan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk melakukan penilaian kinerja anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2020-2023.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan untuk pengembangan keilmuan atau akademis maupun pihak yang memanfaatkan hasil penelitian ini. Secara rinci, penelitian ini akan memberikan manfaat manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik :

- 1) Untuk Penelitian lebih lanjut mengenai kinerja anggaran di lembaga yang sama atau lembaga lain mungkin dapat memberikan manfaat.
- 2) Sebagai informasi dan masukan berdasarkan hasil kajian konseptual kinerja anggaran pada SKPD di pemerintahan daerah.
- 3) Dapat menambah pengetahuan penulis tentang teori- teori Manajemen Kinerja Anggaran.

2. Manfaat Praktis :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Pendidikan Kab. Bekasi tentang pentingnya penilaian kinerja anggaran.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran dan menetapkan

pedoman penyusunan anggaran tahun berikutnya bagi Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kab. Bekasi agar memenuhi kelayakan anggaran yang telah ditetapkan.

- 3) Sebagai pertimbangan informasi dalam pengambilan kebijakan pengelolaan anggaran dengan pendekatan Value For Money.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**